

**EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
DI KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan

Melengkapi Sebagian Dari Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Oleh :

NINDY NOVITA ISKANDAR

2010420062



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2014

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nindy Novita Iskandar

NIM : 2010420062

Jurusan/Peminatan : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT** yang dibimbing oleh Bapak M.Masdar SE, Ak, M.Ak adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014



Nindy Novita Iskandar

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nindy Novita Iskandar

NIM : 2010420062

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Perpajakan

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA
JAKARTA DUREN SAWIT.**

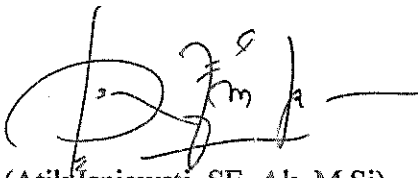
Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diajukan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana tanggal

Jakarta, Agustus 2014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



(Atik Isnawati, SE, Ak, M.Si)



(M.Masdar SE, Ak, M.Ak)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nindy Novita Iskandar

NIM : 2010420062

Jurusan/Peminat : Akuntansi/Perpajakan

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA
JAKARTA DUREN SAWIT.**

Telah diperiksa, dikaji dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana pada tanggal
25 Agustus dengan hasil B.

Jakarta 25 Agustus 2014

Ketua Jurusan Akuntansi,

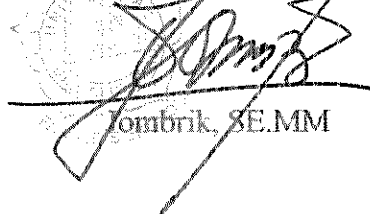


(Atik Isniawati, SE,Ak,M.Si)

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

	Nama Penguji	Jabatan menguji	Tanda tangan
1.	Muhammad Masdar, SE,Ak, M. Ak	Ketua Penguji	
2.	Haryanto DRS Ak.MM	Anggota Penguji	
3.	Atik Isniawati, SE,Ak,M.Si	Anggota Penguji	

Dekan Fakultas Ekonomi,



Jombrik, SE.MM

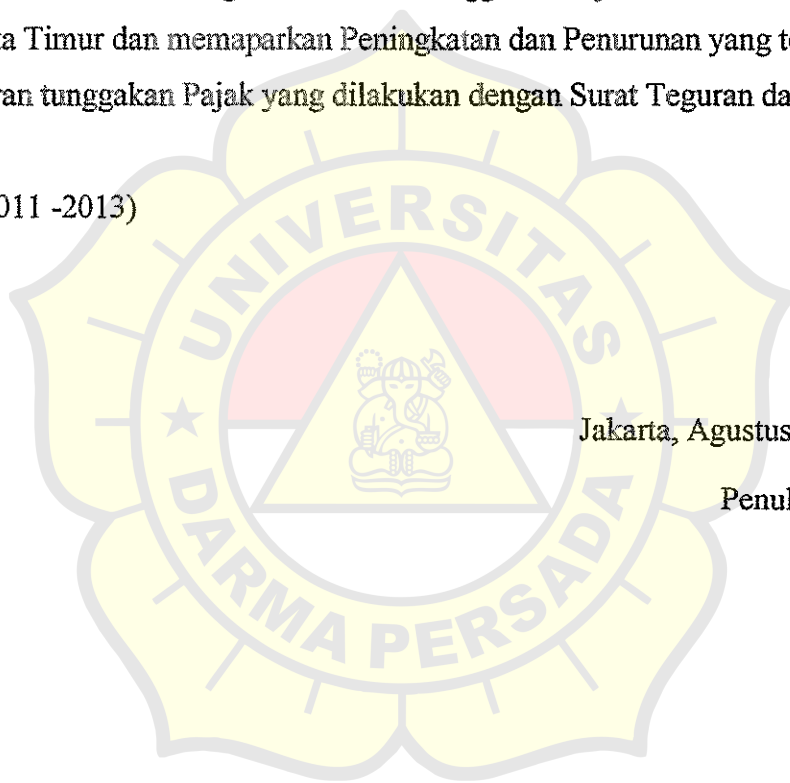
ABSTRAK

NIM : 2010420062, **Judul** : EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR.

Jumlah Halaman : xiii + 68 hal

Kata Kunci : Untuk mengetahui seberapa Efektif Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Prtama Duren Sawit Jakarta Timur dan memaparkan Peningkatan dan Penurunan yang terjadi terhadap Pembayaran tunggakan Pajak yang dilakukan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Daftar Acuan : (2011 -2013)



Jakarta, Agustus 2014

Penulis



FAKULTAS EKONOMI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Ucapkan terimakasih penulis sampaikan pada:

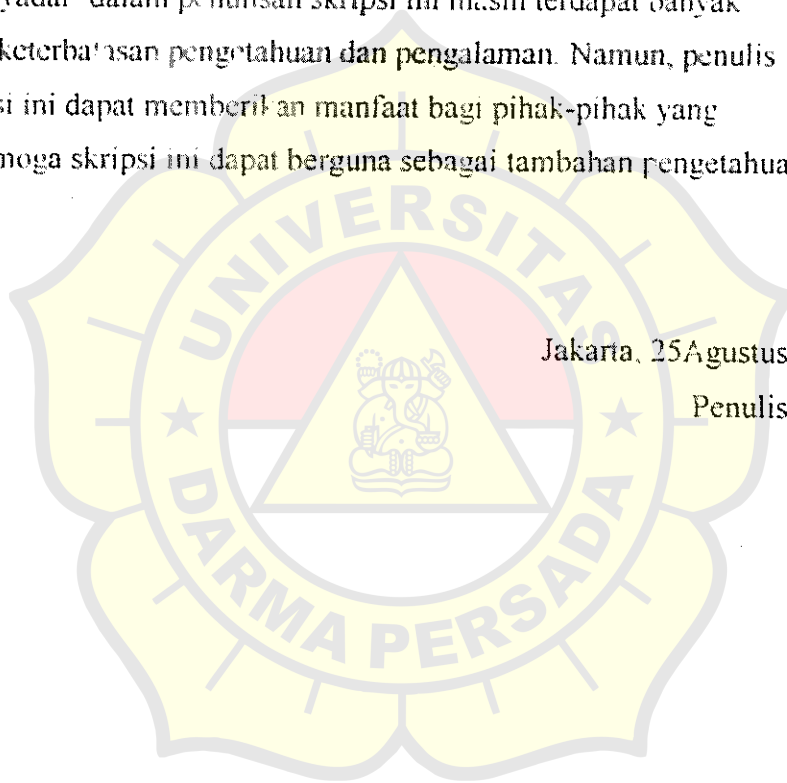
1. Kedua orang tua tercinta, terimakasih, atas dorongan, kasih sayang, saran dan doa yang tak pernah putus, karena Mama dan Papa, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
2. Suami tercinta, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Bpk. Jombrik, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.
4. Ibu. Atik Isniawati, SE,Ak,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada Jakarta.
5. Bapak Muhammed Masdar, SE,Ak, M. Ak selaku pembimbing skripsi yang saya telah memberikan banyak waktu, bimbingan, pengarahan, saran dan kritik yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Darma Persada Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari semester I-VIII.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Darma Persada Jakarta.
8. Kakak dan Adik-adikku tersayang, terimakasih atas dukungannya yang menjadi pelita semangat dalam setiap langkah penulis.

9. Sahabat setia, Verayanti Lepong, Mitr, Wika Sari, Tutik kurniati, Nurkania priyatna, terimakasih atas kebersamaan yang indah dimasa kuliah.
10. Teman teman seperjuangan akuntansi 2010, terimakasih atas persahabatan, dan kenangannya.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga skripsi ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan.

Jakarta, 25 Agustus 2014

Penulis

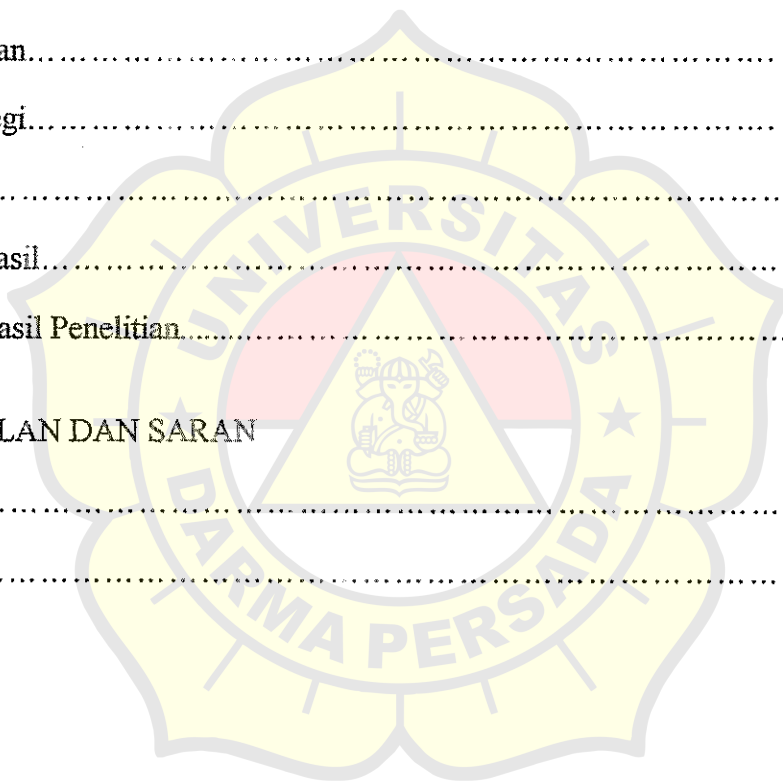


DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pajak	6
2.1.1. Pengertian Pajak	6
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak	9
2.2 Efektifitas	14

2.2.1. Pendekatan Efektifitas	16
2.2.2. Penagihan Pajak	19
2.2.3. Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dasar Hukum.....	20
2.2.4. Tahapan-Tahapan Penagihan.....	21
2.2.5. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo.....	21
2.2.6. Penerbitan Surat Teguran.....	22
2.2.7. Prosedur Penerbitan Surat Teguran.....	23
2.2.8. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran.....	26
2.2.9. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	27
2.2.10. Penerbitan Surat Paksa.....	30
2.2.11. Prosedur Penerbitan Surat Paksa.....	31
2.2.12. Tata Cara Penyampaian Surat Paksa.....	32
2.2.13. Daluwarsa Penagihan Pajak.....	33
2.2.14. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	37
2.3. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	39
3.2. Jenis Data yang digunakan.....	39
3.3. Pengumpulan Data.....	39
3.4. Analisis Data	40
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	42
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	42

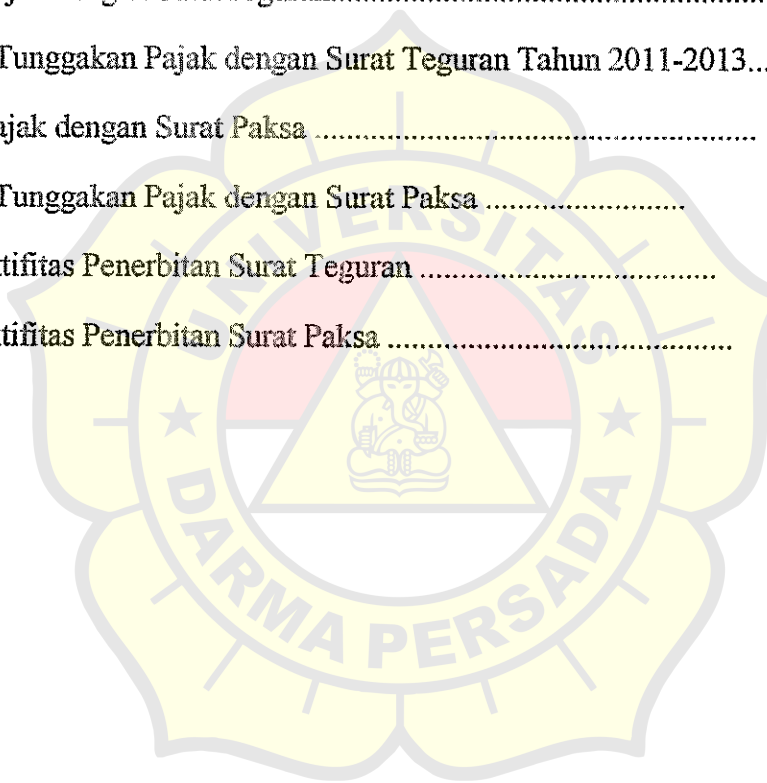
4.1.2. Kedudukan Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	44
4.1.3. Struktur Organisasi.....	47
4.1.4. Peran Strategi.....	50
4.1.5. Visi.....	50
4.1.6. Misi.....	51
4.1.7. Tujuan.....	52
4.1.8. Sasaran.....	52
4.1.9. Strategi.....	53
4.2. Analisis Data.....	55
4.3. Interpretasi Hasil.....	56
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektifitas	41
Tabel 4.1 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2011-2013.....	55
Tabel 4.2 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2011-2013.....	56
Tabel 4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	57
Tabel 4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Tahun 2011-2013.....	58
Tabel 4.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	59
Tabel 4.6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	61
Tabel 4.7 Tingkat Efektifitas Penerbitan Surat Teguran	64
Tabel 4.8 Tingkat Efektifitas Penerbitan Surat Paksa	65



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	38
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- I Surat Ijin Riset
- II Surat Keterangan Riset
- III Surat Keterangan dari Dosen Pembimbing



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan undang-undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta menjamin kedudukan yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digaji terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui identifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Data yang ada di Direktorat Jendral Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang tercatat di Direktorat Jendral Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetapi maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencarian tunggakan pajak oleh Penanggung pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri. Dalam reformasi perpajakan tahun 1993, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak untuk bertindak sebagai *enforcement agent* yaitu tindak penegakkan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk membuat para penanggung pajak memenuhi utang pajaknya selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka

tunggakan, pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Tindakan penagihan merupakan wujud untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan, karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencarian tunggakan pajak memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan Negara, jika banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan sangat berpengaruh dalam penerimaan Negara. Oleh karena itu diperlukan tindakan penindakan penagihan pajak yang efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak dan penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah penagihan pajak dalam Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah Efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat mencairkan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit?

3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap Surat Teguran dan Surat Paksa agar Penanggung pajak dapat membayar utang pajaknya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menelaah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Menganalisis efektifitas penagihan pajak Surat Teguran dan Surat Paksa dapat mencairkan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.
3. Mengevaluasi hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap Surat Teguran dan Surat Paksa agar penanggung pajak dapat membayar utang pajaknya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktis:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektifitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
 - b. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit.

2. Bagi Akademis:

Secara akademis peneliti ini diharapkan untuk mengetahui sejauh mana Teori Perpajakan yang dapat diterapkan sehingga peneliti ini dapat dijadikan pembuktian yang sebenarnya dan diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan melalui upaya mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan, atau membentuk teori-teori, konsep maupun hipotesis tertentu.

